

Pendampingan *Legal Drafting* Peraturan Desa Tangguh Bencana: Penguatan Regulasi Mitigasi di Dusun Merpuji, Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

Hilman Syahrial Haq¹, *Ady Supryadi², Anies Prima Dewi³, Rena Aminwara⁴, Edi Yanto⁵, Fahrurrozi⁶, Tin Yuliani⁷, Sarudi⁸, Hamdi⁹, Baiq Rara Carina Sizi¹⁰, Nasri¹¹, M. Taufuqrahman¹², Bahri Yamin¹³, Sahrul¹⁴, Fitriani Amalia¹⁵, Asri¹⁶

¹⁻¹⁶Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

Article Info

Article history:

Received: December 10, 2025

Revised: December 22, 2025

Accepted: December 31, 2025

Keywords:

Community service, Disaster Resilient Village; legal drafting; disaster mitigation; village regulations; West Lombok.

Abstract

Merpuji Hamlet, situated in Dasan Geria Village within the Lingsar District of West Lombok Regency, is an area particularly vulnerable to natural disasters, including landslides, floods, and residential fires. Despite this high risk, the village has established a Village Regulation (Perdes) aimed at creating Disaster Resilient Villages, serving as a formal instrument for disaster risk reduction (DRR).

This community service program seeks to provide technical guidance (BIMTEK) to the village government and related institutions in crafting the Disaster Resilient Village Regulation. The methods employed in this initiative include the socialisation of disaster regulations, an analysis of local legal needs, the drafting of Perdes, and support for public consultations.

The results of this program indicate an improvement in the capacity of village officials to understand the legal framework necessary for establishing legislation. It has also facilitated the preparation of the draft Perdes for Disaster Resilient Villages and encouraged increased community participation in DRR policy planning. This initiative is expected to serve as a model for the development of community-based disaster regulations throughout West Lombok Regency.

This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.



***Corresponding Author:**

Ady Supryadi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

Email:

1. PENDAHULUAN

Secara geografis dan geologis, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana alam karena posisinya di kawasan *Ring of Fire* dan pertemuan lempeng tektonik aktif. Kondisi ini menuntut adanya sistem mitigasi yang terstruktur dan sistematis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2007).

Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Lombok, memiliki rekam jejak kegempaan yang signifikan. Peristiwa gempa bumi beruntun pada tahun 2018 menjadi bukti

nyata kerentanan wilayah ini, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur masif dan korban jiwa yang besar. Secara seismologis, wilayah ini diapit oleh *Flores Back Arc Thrust* di utara dan zona subduksi lempeng Indo-Australia di selatan, menempatkan desa-desa di wilayah tersebut, termasuk Desa Dasan Geria di Kecamatan Lingsar, dalam zona risiko tinggi (Supendi et al., 2020). Oleh karena itu, urgensi mitigasi bencana di tingkat lokal tidak dapat ditawar lagi demi keberlangsungan hidup masyarakat.

Dalam paradigma desentralisasi, desa memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam manajemen bencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam hal perlindungan dan pemberdayaan masyarakat terhadap ancaman bencana (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Konsep "Desa Tangguh Bencana" (Destana) menekankan kemampuan mandiri desa untuk beradaptasi dan memulihkan diri dari dampak bencana, yang idealnya didukung oleh kerangka regulasi yang kuat di tingkat desa (Amri et al., 2018).

Namun, observasi awal menunjukkan adanya kesenjangan antara normatif hukum dan realitas empiris di Desa Dasan Geria. Meskipun berada di jalur rawan bencana, desa ini belum memiliki instrumen hukum spesifik berupa Peraturan Desa (Perdes) tentang Penanggulangan Bencana. Ketiadaan Perdes ini menyebabkan lemahnya legitimasi hukum dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk program mitigasi, serta ketidakjelasan *Standard Operating Procedure* (SOP) saat terjadi tanggap darurat (Kusumasari et al., 2021). Perancangan peraturan desa (*legal drafting*) membutuhkan keahlian teknis yang sering kali menjadi kendala bagi aparat desa (Asshiddiqie, 2017).

Merespons permasalahan tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan teknik perancangan peraturan desa (*legal drafting*) yang partisipatif. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas aparat desa dalam menyusun naskah akademik dan draf Perdes yang responsif terhadap kearifan lokal dan potensi bencana spesifik. Melalui intervensi ini, diharapkan tercipta produk hukum yang tidak hanya memenuhi aspek formalitas administratif, tetapi juga efektif sebagai instrumen rekayasa sosial untuk membangun budaya sadar bencana di Desa Dasan Geria (Ndaumanu, 2020).

2. METODE

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Penyampaian Materi:

Ceramah interaktif oleh Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

b. Diskusi Komparatif:

Setelah penyampaian materi oleh para nara sumber, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dengan perangkat desa Dasan Geria dibagi yang dibagi dalam kelompok dan diminta Menyusun Draft Rancangan Peraturan Desa Dasan Geria tentang penanggulangan desa Tangguh Bencana.

c. Refleksi Bersama:

Tahapan selanjutnya adalah diskusi terbuka tentang tantangan dan harapan atas Peran Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah guna membantu masyarakat Desa Dasan Geria dalam Menyusun Peraturan Desa tentang Tangguh Bencana

Penggunaan metode tersebut diatas terbukti dapat meningkatkan keaktifan peserta untuk lebih menggali informasi secara mendalam terkait dengan Teknik penyusunan perdes serta bagaimana tanggung jawab desa dalam hal pembentukan Peraturan Desa Tangguh bencana.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan bimbingan teknis *legal drafting* di Desa Dasan Geria telah menghasilkan capaian strategis dalam upaya pelembagaan Desa Tangguh Bencana (Destana). Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya dokumen hukum, tetapi juga dari transformasi kognitif aparatur desa dan terbentuknya komitmen politik lokal.

Secara substansial, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*). Sebelum intervensi, pemahaman aparatur terkait kewenangan desa dalam mitigasi bencana masih bersifat administratif umum. Pasca-pelatihan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai struktur norma hukum, hierarki perundang-undangan, dan mekanisme partisipatif sesuai amanat Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Peningkatan kapasitas ini krusial karena aparatur desa merupakan aktor kunci dalam menerjemahkan risiko bencana lokal seperti likuefaksi, banjir musiman, dan gempa bumi menjadi klausul hukum yang mengikat (Kusumasari et al., 2021). Kemampuan mengidentifikasi risiko ini menjadi basis ontologis dalam penyusunan konsiderans dan batang tubuh peraturan desa.

Luaran utama kegiatan ini adalah tersusunnya draf Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Tangguh Bencana yang mengadopsi pendekatan *Community-Based Disaster Risk Management* (CBDRM). Draft ini dirancang secara komprehensif mencakup delapan muatan materi pokok, mulai dari kelembagaan, pengurangan risiko, hingga pendanaan. Penerapan pendekatan CBDRM memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak bersifat *top-down*, melainkan responsif terhadap kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakat (Shaw, 2012). Secara yuridis, keberadaan draft ini memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa untuk mengambil tindakan preventif dan responsif tanpa keraguan administratif.

Lebih jauh, kegiatan ini berhasil mendorong terbentuknya komitmen kelembagaan yang konkret melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Kesepakatan untuk membentuk Relawan Desa Tangguh Bencana, Tim Evakuasi, dan sistem peringatan dini berbasis komunitas merupakan manifestasi dari modal sosial yang diperkuat oleh legalitas. Kelembagaan ini berfungsi sebagai "organ pelaksana" dari regulasi yang disusun, sehingga Perdes tidak berakhir sebagai dokumen pasif (Ndaumanu, 2020).

Dampak jangka panjang dari pendampingan ini adalah terintegrasinya isu kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan adanya Perdes, program mitigasi memiliki landasan hukum untuk dimasukkan sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Hal ini menjamin keberlanjutan anggaran mitigasi bencana yang bersumber dari Dana Desa, sekaligus membangun budaya sadar bencana yang sistematis dan terlembaga (Amri et al., 2018).

Berikut kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tim lakukan sebagaimana yang terlihat pada Foto-Foto berikut in:



Gambar 1,2 dan 3. Sesi Penyampaian Materi dan Diskusi

3. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat desa Dasan Geria, terhadap Teknik pembentukan Peraturan Desa tentang Penanggulangan Bencana Selain itu juga pengabdian ini dapat memperluas wawasan akademik baik bagi perangkat desa Dasan Geria maupun masyarakat Desa Dasan Geria dalam membantu Pemerintah Desa untuk memberikan masukan terhadap pembentukan Perdes lainnya.

Program pengabdian berupa bimbingan teknik pembentukan Peraturan Desa tentang Desa Tangguh Bencana di Desa Dasan Geria berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas aparatur desa, menghasilkan draft Perdes yang sesuai kaidah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan PRB. Keberhasilan ini diharapkan dapat direplikasi di desa-desa lain di Kabupaten Lombok Barat guna memperkuat ketangguhan desa terhadap risiko bencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini dan tidak lupa juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Pemerintah Desa Dasan Geria atas terjalannya kerjasama ini, semoga kedepan kolaborasi seperti ini dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A., Bird, D. K., Ronan, K., Haynes, K., & Towers, B. (2018). Disaster risk reduction education in Indonesia: Challenges and recommendations for scaling up. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 18(2), 595–612.
- Asshiddiqie, J. (2017). Perihal undang-undang. Rajawali Pers.
- Kusumasari, B., Alam, Q., & Siddiqui, K. (2021). Resource capability for local government in managing disaster. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 20(4), 438-451.
- Ndaumanu, F. (2020). Urgensi Peraturan Desa tentang Penanggulangan Bencana dalam Membangun Desa Tangguh Bencana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 89-98.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007) *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014) *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- UNDP. 2019. *Community-Based Disaster Risk Management Toolkit*.
- Shaw, R. (2012). *Community-based disaster risk reduction*. Emerald Group Publishing.
- Supendi, P., Nugraha, A. D., Widiyantoro, S., Abdullah, C. I., Rawlinson, N. & Palgunadi, K. H. (2020). Hypocenter relocation of the 2018 Lombok earthquake sequence (Indonesia) using local seismic network data. *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, 305, 106520.